

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Hukum Jinayat yang difokuskan kepada Khalwat di Kota Lhokseumawe, yang merupakan salah satu bentuk penerapan otonomi khusus Aceh dalam menegakkan syariat Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi sosialisasi dan peningkatan kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat penegakan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, sehingga pelaksanaan Qanun Jinayat tentang Khalwat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat Tentang Khalwat di Kota Lhokseumawe melibatkan tiga bentuk sanksi utama, yaitu *uqubat* (hukuman fisik seperti cambuk), *hudud* (hukuman tetap untuk pelanggaran berat), dan *ta'zir* (hukuman diskresi seperti pembinaan atau denda). Uqubat diterapkan sebagai efek jera bagi pelanggar, namun pelaksanaannya sering menghadapi kendala sumber daya, resistensi masyarakat, dan persoalan teknis di lapangan. Hudud jarang dijatuhkan karena persyaratan pembuktian yang sangat ketat dan kompleks. Sementara itu, ta'zir lebih banyak digunakan, terutama bagi pelanggar pertama, melalui pendekatan edukatif dan pembinaan keagamaan. Faktor penghambat utama dalam implementasi qanun ini meliputi kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih antara Dinas Syariat Islam dan Satpol PP. Disarankan untuk Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dengan cara Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi oleh Dinas Syariat Islam terkait ketentuan hukum jinayat, khususnya mengenai bentuk-bentuk sanksi *uqubat*, *hudud*, dan *ta'zir*, agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme penegakan syariat Islam secara utuh. Selanjutnya kepada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan petugas syariat juga penting untuk memberikan pelayanan hingga tindakan yang cepat, tepat, dan ramah.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Qanun Aceh, Khalwat, Uqubat.*

ABSTRACT

This research is titled Implementation of Qanun Aceh Number 14 of 2003 on Jinayat Law, focusing on Khalwat in the City of Lhokseumawe, which is a form of implementing Aceh's special autonomy in upholding Islamic Sharia. This study emphasizes the importance of optimizing socialization and increasing collaboration across institutions to strengthen the enforcement of Islamic Sharia in the City of Lhokseumawe, so that the implementation of the Jinayat Qanun on Khalwat can be more effective and aligned with the values of justice and humanity in Islam. This research uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of relevant parties, especially the Lhokseumawe City Department of Islamic Sharia and Dayah Education. The research findings indicate that the implementation of the Jinayat Qanun on Khalwat in Lhokseumawe City involves three main forms of sanctions: uqubat (physical punishment such as caning), hudud (fixed punishment for severe violations), and ta'zir (discretionary punishment such as guidance or fines). Uqubat is applied as a deterrent for offenders, but its implementation often faces constraints in resources, community resistance, and technical issues in the field. Hudud is rarely imposed due to very strict and complex evidentiary requirements. Meanwhile, ta'zir is more widely used, especially for first-time offenders, through an educational and religious guidance approach. The main inhibiting factors in the implementation of this qanun include a lack of information dissemination to the public, limited resources for law enforcement officers, and an overlapping bureaucratic structure between the Department of Islamic Sharia and the Satpol PP. It is recommended for the Lhokseumawe City Department of Islamic Sharia to improve the implementation of Qanun Aceh Number 14 of 2003 on khalwat by enhancing socialization and education by the Department of Islamic Sharia regarding the provisions of jinayat law, especially concerning the forms of sanctions uqubat, hudud, and ta'zir, so that the public understands the purpose and mechanism of Islamic Sharia enforcement as a whole. Furthermore, it is important for the Lhokseumawe City Department of Islamic Sharia to improve the quality of resources through training for sharia officers to provide fast, precise, and humane services and actions.

Keywords: Policy Implementation, Aceh Qanun, Khalwat, Uqubat.